



STUDI IMPLEMENTASI OLAHRAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PAYUNG HUKUM KEOLAHRAGAAN : TINJAUAN TERHADAP PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN

Muhammad Gilang Ramadhan ^{1)*}, Iwan Setiawan ²⁾, Saipulloh Ibrahim ³⁾, Made Bang Redy Utama ⁴⁾

^{1), 2), 3) dan 4)} Universitas Negeri Jakarta

E-mail : ¹⁾ muhammad.gilang@unj.ac.id, ²⁾ iwansetiawan@unj.ac.id, ³⁾ saipulloh.ibrahim@unj.ac.id,
⁴⁾ made.bang@unj.ac.id

ABSTRAK

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan termasuk dalam ruang lingkup yang diatur oleh Undang-Undang Keolahragaan. Tanggung jawab pelaksanaannya berada di bawah kewenangan dua instansi pemerintah, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pendidikan (Disdik). Oleh karena itu, sinergi antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Namun demikian, hingga saat ini belum terjalin sinergi yang optimal antara keduanya, khususnya dalam hal penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan olahraga pendidikan secara lebih efektif. Akibatnya, siswa sebagai subjek utama dari kebijakan tersebut kurang mendapatkan dampak yang positif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan olahraga pendidikan yang berlandaskan pada Undang-Undang Keolahragaan, yang secara konseptual menekankan bahwa olahraga memiliki kontribusi terhadap pembangunan secara luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Meskipun DKJ tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, dinamika pemerintahan terkait pengelolaan olahraga pendidikan masih berpusat di wilayah ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara, observasi lapangan, serta studi terhadap dokumen terkait. Data dianalisis dengan berfokus pada tiga komponen utama dalam menilai implementasi, yaitu Program yang dijalankan, pihak yang menjalankan program, dan pihak yang terdampak dari program tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi olahraga pendidikan telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kekurangan serta ketimpangan dalam penerapannya di beberapa aspek yang ditemukan.

Kata kunci : implementasi; kebijakan; keolahragaan; pendidikan; undang-undang

ABSTRACT

The development and coaching of educational sports is included in the scope regulated by the Sports Law. The responsibility for its implementation lies under the authority of two government agencies, namely the Youth and Sports Agency (Dispora) and the Education Agency (Disdik). Therefore, synergy between the two institutions is the main key in optimizing the function of coaching and developing educational sports. However, until now there has been no optimal synergy between the two, especially in terms of formulating and implementing policies that support the development of educational sports more effectively. As a result, students as the main subjects of the policy have received less positive impact. Based on this background, this study aims to examine the implementation of educational sports policies based on the Sports Law, which conceptually emphasizes that sports have a contribution to development in general. This study uses a qualitative approach with a case study design carried out in the Special Region of Jakarta (DKJ) Province. Although DKJ is no longer the nation's capital, the dynamics of government related to the management of educational sports are still centered in this area. The techniques used to collect data include interviews, field observations, and studies of related documents. The data was analyzed by focusing on three main components in assessing implementation, namely the program being run, the party running the program, and the party affected by the program. The results of this study indicate that the implementation of

educational sports has been in line with the provisions of the Sports Law. However, there are still a number of shortcomings and inequalities in its implementation in several aspects that were found.

Keywords : implementation; policy; sports; education; law

PENDAHULUAN

Di tingkat global, terutama di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan, olahraga telah menjadi elemen penting yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Perhatian dunia terhadap isu keolahragaan mulai mendapat pengakuan resmi sejak November 1978, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi UNESCO '78 menekankan pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah (Physical Education and School Sport/PESS) (UNESCO, 2014). Isu ini menekankan bahwa PESS merupakan sarana strategis dalam membentuk kualitas hidup manusia melalui olahraga, di mana nilai-nilai kehidupan (life skills) diintegrasikan dan ditanamkan sejak usia dini sebagai bagian dari proses pembentukan karakter untuk pembangunan masa depan (Kendellen et al., 2017). Gagasan tersebut mencerminkan paradigma pembangunan suatu negara melalui kebijakan olahraga yang terarah. Dalam konteks ini, peran olahraga pendidikan menjadi sangat strategis karena menjadi wadah utama pembentukan karakter sejak dini, terutama melalui pendidikan jasmani yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Prayoga et al., 2022). Sebagai contoh, Inggris telah mengalokasikan investasi besar dalam pengembangan pendidikan jasmani dasar melalui program "PE and Sport Premium" (Parnell et al., 2017). sebuah inisiatif komunitas dari klub sepak bola profesional yang mendukung kebijakan nasional bertajuk "healthy stadia" atau "stadion sehat." Program ini menyediakan berbagai kegiatan olahraga berbasis sekolah, termasuk penguatan pendidikan jasmani di tingkat dasar (Parnell & Pringle, 2016; Hunt et al., 2014; Curran et al., 2014). Selain itu, menurut R. Bailey et al. (2009), pelaksanaan olahraga pendidikan di sekolah mencakup empat dimensi utama dalam perkembangan peserta didik, yaitu fisik, sosial, afektif, dan kognitif. Keempat dimensi ini memainkan peran krusial sebagai landasan dalam membentuk generasi penerus yang unggul melalui proses pendidikan dan pembelajaran, khususnya melalui aktivitas keolahragaan.

Dalam konteks kontemporer, perumusan sistem pemerintahan dan kebijakan publik semakin sering merujuk pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015–2030. Dalam bidang keolahragaan, perhatian utama tertuju pada isu *Sport for Development and Peace* (SDP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut (Nauright, 2020). Esensi dari konsep SDP terletak pada peran olahraga sebagai media pemersatu masyarakat dan pendorong terwujudnya perdamaian global (Mwaanga & Adeosun, 2019). Keragaman dalam status sosial, agama, dan budaya kerap memunculkan potensi konflik yang berakar pada perbedaan perspektif atau cara pandang, yang salah satu manifestasinya dapat terlihat dalam bentuk tindakan rasisme. Namun, olahraga diyakini mampu mereduksi permasalahan tersebut (Mwaanga & Prince, 2016). Peran olahraga sebagai perekat sosial sangat relevan diterapkan di Indonesia, negara yang dikenal memiliki keragaman suku dan budaya. Implementasi konsep olahraga sebagai sarana pemersatu bangsa dapat diinisiasi melalui bidang olahraga pendidikan sebagai fondasi awal pembentukan nilai-nilai kebersamaan dan integrasi sosial, dengan menanamkan nilai-nilai sportivitas serta sikap saling menghargai (*respect others*) sebagai bagian dari pendidikan karakter sejak dini (Ramadhan et al., 2020). Sehingga hal ini akan memberikan dampak pada kualitas pendidikan di Indonesia yang bisa memberikan pengaruh pada pembangunan yang lebih luas.

Permasalahan utama yang dihadapi terletak pada adanya kesenjangan atau ketidaksinambungan antara kebijakan di bidang olahraga dan pendidikan yang diberlakukan oleh masing-masing lembaga pemangku kepentingan. Ketimpangan ini menjadi isu fundamental dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, yang idealnya harus diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Permasalahan kesenjangan yang terjadi saat ini memberikan dampak yang cukup besar dan cenderung mengarah pada konsekuensi negatif, karena masalah ini berada pada level makro dan memengaruhi berbagai aspek dalam ranah olahraga pendidikan. Dengan adanya Undang-Undang Keolahragaan yang merupakan payung hukum keolahragaan diharapkan bisa menjadi pedoman fundamental dalam pengembangan olahraga pendidikan khususnya dalam merancang solusi terhadap permasalahan kesenjangan yang terjadi saat ini. Peran Undang-Undang Keolahragaan ini juga akan memberikan pengaruh positif dari mulai penerapan kebijakan secara makro hingga menyentuh akar rumput di lapangan. Hal ini merujuk pada kewenangan Undang-Undang Keolahragaan sebagai payung hukum keolahragaan tertinggi di Indonesia.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan olahraga, khususnya dalam konteks olahraga pendidikan, masih belum sepenuhnya mengintegrasikan paradigma *Development Through Sport* (pembangunan melalui olahraga). Praktik yang berlangsung cenderung berfokus pada peningkatan aspek teknis dan performa olahraga semata, tanpa memperhatikan kontribusi strategis olahraga dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai sosial, serta mengembangkan keterampilan hidup peserta didik (Ramadhan et al., 2022). Upaya mewujudkan paradigma *Development Through Sport*, yang menempatkan olahraga sebagai instrumen pengembangan manusia, memerlukan penerapan pendekatan-pendekatan strategis. Salah satu pendekatan yang relevan adalah integrasi keterampilan hidup (*life skills*) ke dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di lingkungan sekolah, sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga media pembentukan kapasitas personal dan sosial peserta didik (Kendellen et al., 2017). Upaya ini diharapkan dapat mendukung proses perkembangan generasi muda, khususnya peserta didik, dalam menyiapkan masa depan mereka. Konsep ini diperkuat oleh empat elemen utama yang dikemukakan oleh Coakley (2010), yaitu mencakup pengembangan kurikulum pendidikan jasmani yang komprehensif, penyelenggaraan kegiatan olahraga ekstrakurikuler, pembangunan kemitraan strategis dengan klub olahraga, serta fasilitasi pengembangan bakat peserta didik di bidang keolahragaan. Dengan demikian, keempat elemen tersebut menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus yang dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, yang tidak dapat dijangkau secara memadai melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. (Edwards & Skinner, 2009). Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh peluang untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai fenomena dan fakta empiris yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan olahraga pendidikan yang visioner dan sesuai kebutuhan, sekaligus memperkuat pendekatan “pembangunan melalui olahraga”.

Informan dalam penelitian ini merupakan individu-individu yang terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan terkait sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Para informan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu: pejabat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pendidikan (Disdik) yang berperan sebagai pengambil kebijakan pada level pemerintahan, serta pelaksana teknis kebijakan yang diwakili oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK); para pakar yang berasal dari kalangan akademisi (Guru Besar) yang memiliki keahlian di bidang terkait; serta Peran kepala sekolah sangat penting sebagai pengelola utama dalam menjalankan dan mengembangkan sistem olahraga pendidikan di lingkungan sekolah. Namun untuk pencatuman nama yang diungkapkan pada bagian hasil, kami berikan koding berupa inisial sebagai etika kerahasiaan identitas informan dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan mekanisme penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan dalam melakukan penilaian yang meliputi: Tahap I, dilakukan dengan kegiatan pengumpulan informasi yang didapat, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan selanjutnya hingga pada pemetaan informasi yang sudah dikumpulkan. Kemudian pada tahap II terbagi menjadi empat tahapan yaitu: (a) perumusan tujuan penilaian; (b) pemilihan dan/atau pengembangan instrument penilaian; (c) pelaksanaan penilaian; (d) pengolahan hasil penilaian. Tahap III atau tahap final terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu Analisa data yang sudah ditemukan, kemudian pelaporan hasil penilaian, hingga pada diseminasi dan publikasi hasil penelitian yang sudah dilaksanakan mengenai analisis olahraga pendidikan dalam mencapai konsep pembangunan melalui olahraga dengan salah satu tujuannya yang berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pada peningkatan kualitas pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 17 dan 18 yang mengatur tentang olahraga pendidikan serta Pasal 26 yang menekankan aspek pembinaan dan pengembangannya, terdapat sejumlah aspek krusial yang menjadi perhatian dalam penelitian ini terkait implementasi kebijakan olahraga pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Aspek-aspek tersebut difungsikan sebagai indikator untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, peneliti merumuskan simpulan dari masing-masing indikator yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Analisa Implementasi Indikator Olahraga Pendidikan

No.	Indikator	Aspek yang diamati	Temuan
1	Pelaksanaan dan kegiatan siswa pada olahraga pendidikan	Pelaksanaan olahraga pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal, baik dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara berjenjang, terstruktur, dan dimulai sejak usia dini. Proses	Diterapkan

		ini difasilitasi oleh pendidik serta tenaga profesional di bidang keolahragaan.	
2	Sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk olahraga pendidikan	Diterapkan, namun belum secara keseluruhan memadai
3	Sistem pembinaan dan pengembangan prestasi pada lingkup olahraga pendidikan	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara rutin mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional, merupakan bagian dari strategi pengembangan olahraga. Upaya ini juga melibatkan integrasi program keolahragaan dengan sistem pendidikan nasional melalui pembentukan unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), serta pendirian sekolah-sekolah khusus olahraga.	Diterapkan

Pelaksanaan dan kegiatan siswa pada olahraga pendidikan

Pelaksanaan olahraga pendidikan harus mengacu pada kurikulum yang diterapkan dengan didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan tertinggi pada pelaksanaan pendidikan di Indonesia (Ramadhan et al., 2020). Menurut informan (DP-TW, GP-D, GB-MA) yang ditemui oleh peneliti mengungkapkan bahwa, "Olahraga pendidikan atau PJOK dilaksanakan sejak usia dini tentunya secara berjenjang dari mulai kelas 1 SD sampai SMA, yang terbagi pada jalur formal dan non formal, kemudian secara praktiknya ada format intrakurikuler yang dipimpin guru, serta ekstrakurikuler dipimpin oleh pelatih".

Pada dokumen yang berkaitan dengan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta, serta observasi peneliti juga ditemukan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan keterlibatan siswa dalam olahraga pendidikan telah sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang Keolahragaan serta berhubungan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penunjang utama dalam pelaksanaan olahraga pendidikan (Muhlisin et al., 2021). Aspek ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seperti disampaikan oleh informan (DO-TC, DP-TW, KS-PM) yang menyatakan bahwa, "di Jakarta ini sarana dan prasarana memang masih dinilai secara kualitas memadai, namun secara ketersediaan bisa dikatakan terbatas karena minimnya ketersediaan lahan atau ruang terbuka terutama di lingkungan sekolah".

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pun memang terlihat lahan di Jakarta ini sangat terbatas untuk melakukan aktivitas fisik terutama pada lingkungan sekolah yang sangat terbatas ketersediaan lahannya. Hal ini dikarenakan memang ruang terbuka sudah banyak alih fungsi untuk keperluan pembangunan lainnya. Sehingga sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan olahraga pendidikan kurang optimal.

Sistem pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga pendidikan

Dalam proses pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan kaitannya dengan Raihan prestasi olahraga, tentunya perlu didukung dengan sistem yang dirancang untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya yang penting adanya kejuaraan disetiap jenjang, hingga pada pembinaan yang berkelanjutan (Paramitha et al., 2022). Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh informan peneliti (DO-TC, GP-D, GB-MA) yang memaparkan bahwa “Upaya pembinaan atlet muda di Jakarta tergolong optimal, terlihat dari pelaksanaan kejuaraan tahunan yang konsisten, keberlanjutan program seperti POPB hingga PPLM, serta tersedianya Sekolah Khusus Olahraga sebagai sarana pendukung.”

Merujuk pada dokumen yang ditelaah serta observasi yang dilakukan, memang di Jakarta sudah melaksanakan dengan aspek penting yang termaktub pada Undang-Undang Keolahragaan. Adanya kejuaraan berkelanjutan di kalangan pelajar, sistem yang terintegrasi dengan pendidikan nasional, serta pembinaan atlet muda dalam jangka panjang melalui program POPB dan fasilitas Sekolah Khusus Olahraga (SKO) menjadi bukti bahwa di Jakarta ini sudah mengimplementasikan amanah Undang-Undang Keolahragaan, sehingga dampaknya saat ini prestasi olahraga Jakarta terus menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Olahraga menjadi salah satu komponen penting yang berperan dalam mendorong pembangunan nasional. Hal ini tercermin pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana olahraga dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, olahraga juga dipandang sebagai media strategis untuk memperkuat citra negara serta mempertahankan eksistensinya di kancah internasional (Ma'mun, 2019; Ramadhan et al., 2022). Oleh karena itu, olahraga dan pendidikan menjadi dua aspek krusial yang harus mendapat perhatian serius dari para pemimpin negara dalam upaya menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa. Integrasi antara kedua aspek tersebut diyakini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap proses pembangunan nasional. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi perumusan kebijakan di masa mendatang, khususnya terkait pengembangan kebijakan olahraga yang lebih terarah, terutama dalam konteks olahraga pendidikan.

Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Dispora serta Disdik terkesan belum terkoordinasi dengan baik, karena masing-masing menjalankan program olahraga pendidikan secara terpisah dalam agenda kerja tahunan mereka. Kondisi ini tentu sangat disayangkan karena absennya kolaborasi antara dua instansi pemerintah yang seharusnya saling bersinergi. Harris & Houlihan (2016) menyatakan sejak awal abad ke-21, kemitraan atau kolaborasi telah menjadi elemen kunci dalam kebijakan pemerintah Inggris dalam upaya memperluas akses dan meningkatkan partisipasi pelajar dalam kegiatan olahraga. Kolaborasi ini tidak hanya diposisikan sebagai strategi pendukung, tetapi juga sebagai komponen utama dalam kebijakan sektor pendidikan dan keolahragaan. Dalam konteks tujuan olahraga pendidikan, terdapat dua sasaran utama yang pencapaiannya sangat bergantung pada efektivitas kerja sama antara institusi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan lembaga yang mengelola sektor olahraga. Oleh karena itu, membangun sinergi antara kedua institusi tersebut di Indonesia menjadi suatu kebutuhan strategis untuk mengoptimalkan hasil yang

dicapai dalam pengembangan olahraga pendidikan, sebagaimana yang telah dicapai oleh Inggris dalam perkembangan olahraga mereka yang kini dinilai telah maju. Pendekatan ini menjadi sebuah inovasi dalam kajian olahraga, khususnya dalam ranah olahraga pendidikan, yang menargetkan kontribusi nyata terhadap pembangunan secara lebih luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, implementasi kebijakan olahraga pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Jakarta selaku pemangku kebijakan, telah mencakup sebagian besar aspek yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek masih belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal integrasi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga belum memadai secara keseluruhan, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih intensif dan terkoordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pendidikan dalam pengembangan olahraga pendidikan, agar olahraga dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keolahragaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, R., Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., & Sandford, R. (2009). The educational benefits claimed for physical education and school sport: An academic review. *Research Papers in Education*, 24(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/02671520701809817>
- Coakley, J. (2010). Journal of Physical Education, Recreation & Dance The " Logic " of Specialization The " Logic " of Specialization: Using Children for Adult Purposes. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.2010.10598520>
- Curran, K., Bingham, D. D., Richardson, D., & Parnell, D. (2014). Ethnographic engagement from within a Football in the Community programme at an English Premier League football club. *Soccer and Society*. <https://doi.org/10.1080/14660970.2014.920627>
- Edwards, A., & Skinner, J. (2009). Qualitative research in sport management. In *Qualitative Research in Sport Management*. <https://doi.org/10.4324/9780080942629>
- Harris, S., & Houlihan, B. (2016). Competition or coalition? Evaluating the attitudes of National Governing Bodies of Sport and County Sport Partnerships towards School Sport Partnerships. *International Journal of Sport Policy*, 8(1), 151–171. <https://doi.org/10.1080/19406940.2015.1024708>
- Hunt, K., Wyke, S., Gray, C. M., Anderson, A. S., Brady, A., Bunn, C., Donnan, P. T., Fenwick, E., Grieve, E., Leishman, J., Miller, E., Mutrie, N., Rauchhaus, P., White, A., & Treweek, S. (2014). A gender-sensitised weight loss and healthy living programme for overweight and obese men delivered by Scottish Premier League football clubs (FFIT): A pragmatic randomised controlled trial. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62420-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62420-4)
- Kendellen, K., Camiré, M., Bean, C. N., Forneris, T., & Thompson, J. (2017). Integrating life skills into Golf Canada's youth programs: Insights into a successful research to practice partnership. *Journal of Sport Psychology in Action*. <https://doi.org/10.1080/21520704.2016.1205699>
- Ma'mun, A. (2019). Governmental Roles in Indonesian Sport Policy: From Past to Present. *International Journal of the History of Sport*. <https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Muhlisin, M., Paramitha, S. T., Purnama, Y., Qomarullah, R., & Ramadhan, M. G. (2021). Sport of

- Policy Analysis and Evaluation: a Systematic Literature Review. *Jp.Jok (Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan)*. <https://doi.org/10.33503/jp.jok.v5i1.1677>
- Mwaanga, O., & Adeosun, K. (2019). Reconceptualizing sport for development and peace (SDP): an ideological critique of Nelson 'Madiba' Mandela's engagement with sport. *Sport in Society*, 0437. <https://doi.org/10.1080/17430437.2019.1584184>
- Mwaanga, O., & Prince, S. (2016). Negotiating a liberative pedagogy in sport development and peace: understanding consciousness raising through the Go Sisters programme in Zambia. *Sport, Education and Society*, 21(4), 588–604. <https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1101374>
- Nauright, J. (2020). Sport for development and peace. In *Routledge Handbook of Sport, Race and Ethnicity*. <https://doi.org/10.4324/9781315745886-11>
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(1), 132–144. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2165>
- Parnell, D., Cope, E., Bailey, R., & Widdop, P. (2017). Sport policy and English primary physical education: the role of professional football clubs in outsourcing. *Sport in Society*, 20(2), 292–302. <https://doi.org/10.1080/17430437.2016.1173911>
- Parnell, D., & Pringle, A. (2016). Football and health improvement: an emerging field. In *Soccer and Society*. <https://doi.org/10.1080/14660970.2015.1082753>
- Prayoga, I. G. A. B., Sugianta, I. W., & Suarjana, I. N. (2022). Memanfaatkan Pembelajaran Resiprokal dalam Bimbingan Kelompok sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Teknik Dasar Permainan Bulutangkis. *Bajra : Jurnal Keolahragaan*, 1(2), 52–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7124813>
- Ramadhan, M. G., Ma'mun, A., & Mahendra, A. (2020). Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. *Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan*. <https://doi.org/10.17509/jtikor.v5i1.23824>
- Ramadhan, M. G., Paramitha, S. T., Ma'mun, A., Nuryadi, N., & Juliantine, T. (2022). Analysis of Elite Sports Development Patterns through Sports Education. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(4), 868–893. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2619>
- UNESCO. (2014). World-wide Survey of School Physical Education. In *Unesco*.